



**P E N E T A P A N**

**Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pedata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan wali Pengampu yang diajukan oleh:

**Rommy, SKM bin Sirman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu, bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, RT/RW 001/001, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu atas 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, tempat tanggal lahir, Palopo, 01 Maret 2001/18 tahun;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2001 di Palopo telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, yaitu anak kedua dari pasangan suami istri Hasrat Rahman bin Abd. Rahman dan Misqiani, S.Tr.Keb. binti Sarjono sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LU-17092011-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 September 2011 ;
2. Bahwa kedua orang tua Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Bahwa Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman sudah 3 tahun tinggal di rumah Pemohon yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu. Bahkan Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7271042809160001 ;
4. Bahwa Pemohon adalah paman Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, dimana istri Pemohon adalah bibi dari Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman ;
5. Bahwa oleh karena Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman sebagaimana dalam posita 1 (satu) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut ;
6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman (laki-laki), umur 18 tahun;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rommy, SKM, Nomor 7204071712740003 tanggal 30

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 138/1/II/1995 tanggal 12 Mei 1995 atas nama Hasrat Rahman menikah dengan Misqiyani, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rommy menikah dengan Usrek Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 30/04/IV/2006, tertanggal tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Dzulkarnain Nomor 7324-LU-17092011-0002, tanggal 17 September 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti (P.4);

5. Asli Surat Penyerahan Anak dari Hasrat Rahman (ayah kandung anak Muh. Dzulkarnain kepada Rommy, SKM bermeterai cukup diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/7430/VIII/YAN.2.3/2019/ST-INTELKAM, atas nama Rommy, SKM, tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palu Kasatin Intelkam, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rommy, SKM (Pemohon) Nomor 7271042809160001 tanggal 06 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti (P.7);

8. Asli Surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samaritan Nomor 112/RS-SMRT/SKBS/VII-2019 tanggal 31 Juli 2019, atas nama Pemohon, bermeterai cukup diberi tanda bukti (P.8);

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Erni binti Bustamin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu, Nomor 78, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rommy, S.KM bin Sirman, karena saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak yang akan dibawah pengampuan Pemohon bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman adalah anak saudara istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Muh. Dzulkarnain setelah tinggal di rumah Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat karena istri Pemohon bersaudara dengan ibu kandung anak bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak saudaranya bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman yang saksi ketahui ayah kandung anak Muh. Dzulkarnain bernama Hasrat Rahman adalah petani, sedangkan ibu kandungnya bernama Misqiani, S.Tr.Keb. adalah pegawai di kampungnya di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon memohon untuk menjadi wali pengampu terhadap anak bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



karena anak tersebut mau mendaftar menjadi anggota TNI-AD, sehingga untuk mengurus segala administrasi yang menjadi persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD adalah Pemohon karena orang tua anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

- Bahwa umur anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman belum dewasa karena untuk mendaftar menjadi anggota TNI harus berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan anak Muh. Dzulkarnain belum mencapai batas minimal umurnya, sehingga harus di bawah perwalian pendaftarannya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keluarga atau kedua orang tuanya keberatan anaknya dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu untuk membiayai anak Muh. Dzulkarnain karena selama 3 tahun ini Pemohon yang memberikan biaya pendidikan, dan Pemohon adalah pegawai yang mempunyai rasa tanggung jawab dan sehat jasmani serta bertanggung jawab, selama anak Muh. Dzulkarnain tinggal di rumah Pemohon sehat-sehat dan berbudi pekerti baik;

Saksi II Eva Yulitasari binti Surdin Dg. Mangindo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan honorer di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rommy, SKM bin Sirman karena selain sebagai tetangga, juga sama-sama satu kantor;
- Bahwa saksi kenal juga anak bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat karena sudah 3 tahun tinggal di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal





- Bahwa saksi kenal juga orang tua kandung anak Muh. Dzulkarnain bapaknya bernama Hasrat Rahman karena ibu kandungnya bersaudara dengan istri Pemohon;
- Bahwa menurut informasi ayah kandung anak Muh. Dzulkarnain adalah petani, sedangkan ibunya adalah pegawai negeri sipil;
- Bahwa anak yang mau dibawah perwaliannya adalah kemanakannya sendiri, yaitu anak saudara istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan menjadi wali pengampu terhadap anak Muh. Dzulkarnain karena untuk pengurusan segala administrasi pengurusan untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD;
- Bahwa Pemohon yang menjadi wali terhadap anak tersebut untuk mendaftarkan diri menjadi calon TNI-AD karena kedua orang tuanya jauh yaitu ada dikampungnya di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa untuk mendaftar menjadi anggota TNI-AD harus mempunyai umur sekurang-kurangnya 18 tahun 7 bulan, sedangkan anak Muh. Dzulkarnain belum sampai umurnya sehingga perlu perwalian;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung anak Muh. Dzulkarnain ikhlas menyerahkan anaknya di bawah perwalian Pemohon, dan tidak ada keluarganya yang keberatan;
- Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil mampu membiayai Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman yang akan di bawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai budi pekerti yang baik dan berbadan sehat baik dan bertanggung jawab, dan selama anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat tinggal di rumah Pemohon dalam keadaan sehat-sehat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk menjadi wali dari kemenakannya yang masih di bawah umur yaitu Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, karena anak tersebut sudah 3 (tiga) tahun tinggal di rumah Pemohon bahkan sudah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P.7, dan Pemohon bermaksud mendaftarkan anak tersebut menjadi anggota TNI-AD di Palu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi dan surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Palu, menunjukkan bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga yang berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon menunjukkan bahwa orang tua anak Muh. Dzulkarnain benar telah menikah dan melahirkan anak yaitu Muh.

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal





*Dzulkarain, menunjukkan ada keinginan yang kuat dari orang tua anak menyerahkan anaknya di bawah perwalian Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon telah berkeluarga dan sudah dapat dipercaya menjadi wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, menunjukkan anak tersebut lahir di Kabupaten Luwu pada tanggal 1 Maret 2001 sehingga dapat dihitung umur anak tersebut sekarang baru menginjak usia 18 tahun sehingga dengan bukti tersebut dapat diketahui bahwa anak Muh. Dzulkarnain belum mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun dan belum cakap bertindak hukum untuk mendaftarkan dirinya masuk menjadi anggota TNI-AD, oleh karenanya harus dilakukan oleh Pemohon sebagai kurat (pengampu) anak bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli Surat Pernyataan Penyerahan anak dari Hasrat Rahman (ayah kandung anak Muh. Dzulkarnain) kepada Pemohon untuk menjadi pengampu terhadap anaknya, sehingga dengan bukti P.5 menunjukkan adanya kesepakatan antara orang tua anak dengan Pemohon yang bersedia menerima sebagai wali pengampu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6, membuktikan bahwa Pemohon memiliki catatan kepolisian yang baik dan belum ditemukan catatan yang berkaitan dengan kriminalitas, sehingga bukti P.6 dapat ditetapkan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman sudah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai family tertanggung, dengan demikian tidak ada hambatan bila anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman di

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu karena berbadan sehat masih mampu mencari nafkah, untuk kebutuhan semua di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadapkan Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kemanakannya yang sudah lama bersamanya, dan sampai saatnya memungkinkan untuk mendaftar menjadi anggota TNI-AD tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako Kota Palu;
- Bahwa Anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman adalah anak kedua dari Hasrat Rahman dan ibunya Misqiani, S.Tr.Keb. keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur dan sudah menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah sepakat dengan istrinya untuk menjadi wali pengampu terhadap anak Muh. Dzulkarnain agar dapat menguruskan pendaftarannya di AJENREM 132 Tadulako Palu menjadi anggota TNI-AD tahun 2019;
- Bahwa maksud untuk menjadi anak di bawah perwalian Pemohon mendaftarkan diri menjadi anggota TNI-AD karena anak

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



Muh. Dzulkarnain Hasrat masih di bawah umur dan kedua orang tua kandungnya jauh;

- Bahwa Hasrat Rahman ayah kandung Muh. Dzulkarnain telah menyerahkan anaknya di bawah perwalian Pempohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan berbadan sehat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendaftarkan anak Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman mengikuti testing penerimaan calon anggota TNI-AD karena anak Muh. Dzulkarnain belum sampai umurnya untuk mendaftar sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali pengampu atas anak kemasukannya bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih dari Hasrat Rahman kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak dan kepentingan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal*



2. Menetapkan Pemohon (Rommy, SKM bin Sirman) sebagai wali pengampu (curator) terhadap anak kemanakannya bernama Muh. Dzulkarnain bin Hasrat Rahman, umur 18 tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu yang berhak mengurus administrasi yang menjadi persyaratan pengajuan seleksi calon anggota TNI-AD.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Drs. Samsudin, SH.**

Panitera Pengganti,

**Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)